

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

FAISAL RAHMAN S

A011171507



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FAISAL RAHMAN S
A011171507**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

FAISAL RAHMAN S

A011171507

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 20 Juli 2022

Pembimbing I

Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D
NIP. 19610806 198903 1 004

Pembimbing II

Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

FAISAL RAHMAN S
A011171507

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 23 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1.	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D.	Ketua	1.
2.	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.	Sekretaris	2.
3.	Drs. Bakhtiar Mustari., M.Si.	Anggota	3.
4.	Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS.	Anggota	4.

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Faisal Rahman S**
Nomor Pokok : A011171507
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Agustus 2022

Yang Menyatakan



(Faisal Rahman S)

Nim: A011171507

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini hadir sebagai salah satu bentuk keresahan akan masalah perekonomian dilingkup sekitar, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya penelitian dalam bentuk skripsi dan merupakan wujud pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi Mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu Penulis sangat terbuka menerima setiap kritik dan saran dari pembaca terkait tulisan ini, agar skripsi ini mampu memberikan banyak pembelajaran serta membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang mendidik. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung Penulis secara penuh. Untuk itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Allah SWT atas kehendak dan kemurahan-Nya memberikan hati yang tulus, pemikiran, energi pada setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Orang tua penulis, Ayahanda H. Syarifuddin dan Ibunda Hj. Darnawati yang dapat menjadi teladan bagi penulis serta berhasil menjadi orang tua yang selalu mendidik, memotivasi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala kepercayaan, doa serta restu yang diberikan sehingga memudahkan penulis dalam menghadapi setiap tahap kehidupan.

3. Ketua, Sekretaris serta Staff Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si., CWM® selaku penasihat akademik penulis. Terima kasih memberikan arahan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA, Ph.D. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku pembimbing II. Terimakasih untuk setiap kritik, saran serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS. dan Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF. selaku dosen penguji, terimakasih untuk pertanyaan-pertanyaan serta kritik dan saran membangun yang disampaikan pada saat seminar proposal dan ujian skripsi.
7. Seluruh Dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman ERUDITE terimakasih untuk setiap momen kebersamaan dan bantuan selama perkuliahan. Terkhusus “Anak Rektor” terimakasih atas persaudaraannya dan bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga bisa melalui proses perkuliahan dengan mudah dan sangat berkesan. Penulis merasa bersyukur dipertemukan dengan mereka dalam proses perkuliahan.
9. Kepada keluarga besar HIMAJIE dan EKOWOWITS. Terimakasih atas segala kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban segala bentuk

tanggung jawab, terimakasih juga telah menjadi tempat terbaik untuk belajar dan berporoses.

10. Kepada Sobat MEDKOM terimakasih untuk semua keceriaan dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Medkom agar tetap mengudara.
11. Tak lupa juga Penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Mar'atus Sholihah Amir SE. atas segala kesetiaan dan ketulusannya dalam mendukung setiap apapun yang Penulis lakukan dan rencanakan.
12. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 23 Agustus 2022

FAISAL RAHMAN S

ABSTRAK

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Faisal Rahman S

Muhammad Yusri Zamhuri

Sabir

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan (Bapenda SulSel) dengan jenis data runtutan waktu (*time series*) dalam 15 tahun terakhir yaitu 2006-2020. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi berganda. Hasil penelitian yang telah dilakukan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Belanja daerah, Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH, LOCAL REVENUES AND GENERAL ALLOCATION FUNDS FOR EXPENDITURES OF THE SOUTH SULAWESI PROVINCIAL GOVERNMENT

Faisal Rahman S

Muhammad Yusri Zamhuri

Sabir

This study aims to analyze the effect of Economic Growth, Regional Native Income and General Allocation Fund on regional expenditures in South Sulawesi Province. This research is a quantitative study using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (Kemenkeu RI) and the Regional Budget report (APBD) by the South Sulawesi Provincial Revenue Agency (Bapenda SulSel) with the type of time series data in the last 15 years, namely 2006-2020. The data analysis method used is a multiple regression model. The results of research that has been carried out on the Economic Growth of South Sulawesi Province have no effect on Regional Expenditure of South Sulawesi Province. Meanwhile, the Regional Original Income and General Allocation Fund of South Sulawesi Province have a positive and significant effect on the Regional Expenditure of South Sulawesi Province. Simultaneously, Economic Growth, Regional Original Income, and General Allocation Fund affect the Regional Expenditure of South Sulawesi Province.

Keywords: Regional spending, Economic growth, Local revenue, General allocation fund.

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR PUSTAKA	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Pengeluaran Pemerintah	13
2.1.2 Desentralisasi Fiskal	17
2.1.3 Belanja Daerah	18
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	20
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
2.1.6 Dana Alokasi Umum (DAU)	27
2.2 Pengaruh Antar Variabel.....	28
2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah	28
2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.....	29
2.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.....	31
2.2.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita.	32
2.3 Penelitian Terdahulu	33
2.4 Kerangka Konseptual.....	36
2.5 Hipotesis Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	39
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.4 Metode Analisis Data	40
3.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	40

3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	41
3.4.3 Uji t (Parsial).....	42
3.4.4 Uji F (Simultan).....	42
3.5 Definisi Operasional Variabel	42
BAB IV PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Objek Penelitian	44
4.1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	45
4.1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	47
4.1.3 Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU)	49
4.1.4 Perkembangan Belanja Daerah.....	51
4.2 Analisis Data	53
4.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
4.2.3 Uji Parsial (Uji T)	55
4.2.4 Uji Simultan (Uji F).....	56
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah.....	56
4.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.....	58
4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah ..	60
4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah(PAD), dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah	62
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Hasil Estimasi Regresi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Perkembangan Pengeluaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	3
1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan	4
1.3 Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	6
1.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Sulawesi Selatan	9
2.1 Keynesian Cross.....	13
2.2 Pengeluaran Pemerintah Menurut Hukum Wagner.....	15
2.3 Pengeluaran Pemerintah Menurut Peacock dan Wiseman.....	17
2.4 Kerangka Konseptual Penelitian	38
4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi.....	47
4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	49
4.3 Perkembangan Dana Alokasi Umum	50
4.4 Perkembangan Belanja Daerah	52
4.5 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah	59
4.6 Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah yang berada di Wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan Pemerintah Daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai otonomi daerah. Dengan itu, untuk mengatur segala kas milik daerah yang dipergunakan dalam pelayanan publik di daerah dapat diatur dengan mudah oleh Pemerintah Daerah.

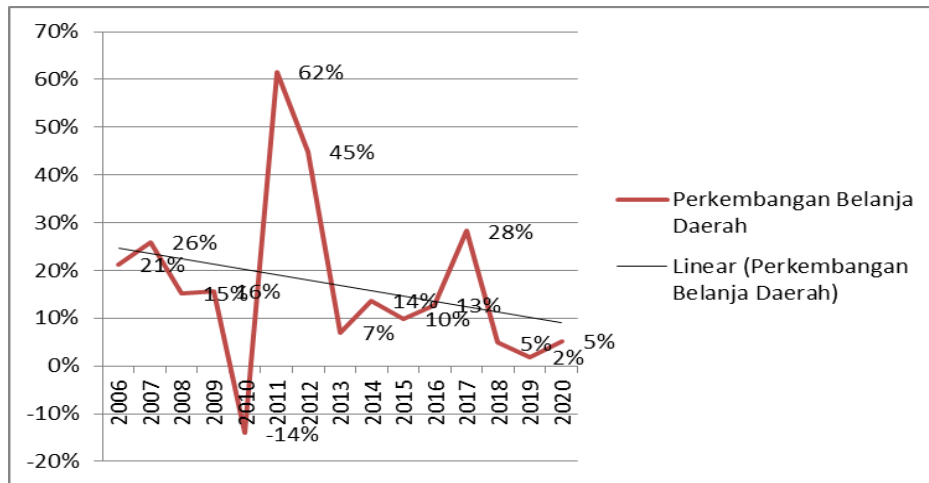
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran

setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran, dan di pihak lain menggambarkan perkiraandan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Mamesah, 1995).

Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan untuk membiayai program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi.

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal telah diterapkan oleh pemerintah sejak lama yaitu dengan di tetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah, dengan begitu setiap daerah diharapkan mampu membangun daerahnya sendiri. Perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat berdasarkan gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020



Sumber: DPJK Kemenkeu, data diolah 2022

Dari Gambar 1.1 menunjukkan besarnya Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama 15 tahun dari tahun 2006-2020. Terlihat pada tabel bahwa perkembangan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tren menurun. Pada tahun 2010, Perkembangan Belanja Daerah dari tahun sebelumnya menurun jauh mencapai -14%, akan tetapi cukup meningkat pada tahun 2011 hingga 62% akan tetapi kembali turun selama 2 tahun berturut-turut. Secara umum, perkembangan Belanja Daerah dari tahun 2006-2020 mengalami fluktuasi cenderung menurun dengan rata-rata sebesar 17% setiap tahunnya.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan. Jumlah pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka

panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan serta besarnya kapasitas fiskal.

Semakin tinggi presentase Belanja Daerah suatu daerah mencerminkan semakin makmur dan semakin baik daerah tersebut. Presentase Belanja Daerah tinggi mengartikan bahwa pada tahun tertentu mempunyai dana cukup dan sudah memenuhi himbauan pemerintah pusat dengan mengalokasikan belanja daerah lebih dari batas minimal dan belanja tersebut dapat berdampak pada penyediaan pelayanan yang lebih baik. Tersedianya pelayanan publik yang baik akan berdampak padalancarnya kegiatan perekonomian setempat karena akan menarik investoryang akan berinvestasi di daerah tersebut.

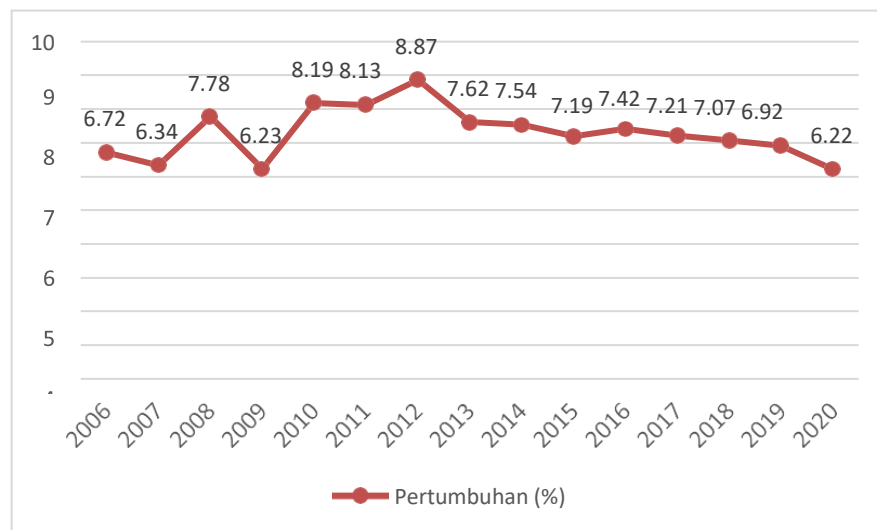
Sebaliknya, rendahnya presentase Belanja Daerah suatu daerah mencerminkan daerah tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk mengalokasikan belanja daerah dikarenakan adanya pelaksanaan prioritas anggaran untuk hal lain. Akan tetapi hal tersebut akan berdampak terhadap pelayanan publik kepada masyarakat karena jika infrastruktur atau aset tetap yang dimiliki kurang memadai maka akan berdampak terhadap produktifitas masyarakat dan dapat mengurangi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya didaerah tersebut bahkan akan mengganggu pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan

baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ditandai dengan

meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Berikut merupakan Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dari tahun 2006-2020:

Gambar 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020



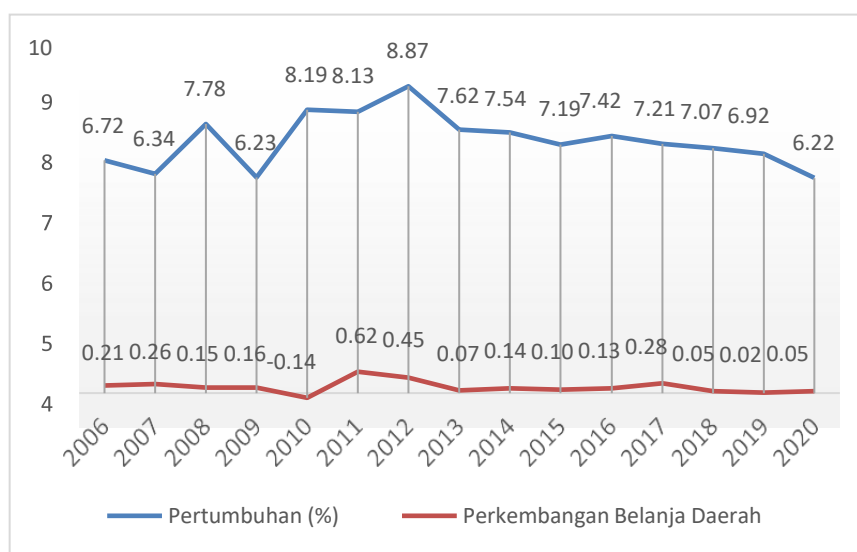
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah 2022

Dari Gambar 1.2 menunjukkan besarnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan selama 15 tahun dari tahun 2006-2020. Terlihat pada tabel bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Selatan fluktuatif. Pada tahun 2009, tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki presentase terendah selama 15 tahun sebesar 6.23% dan presentase pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2012 sebesar 8.87%. Kemudian di tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan fluktuatif. 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan terus menurun dengan rata-rata sebesar 6,9% setiap tahunnya.

Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja daerah, hal tersebut terjadi pada Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat

dilihat pada gambar 1.3. Pada tahun 2009-2010 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 19.6% tetapi belanja daerah turun drastis mencapai -14%. Ditahun 2011-2012 juga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7.4% tetapi belanja daerah turun menurun sebesar 18%.

Gambar 1.3 Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja daerah Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020



Sumber: BPS dan DPJK Kemenkeu, data diolah, 2022

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang mandiri melalui Belanja Daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri ini maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber- sumber keuangan yang bersumber dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari pengelolaan potensi didaerahnya sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah

adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, terdiri dari hasil pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

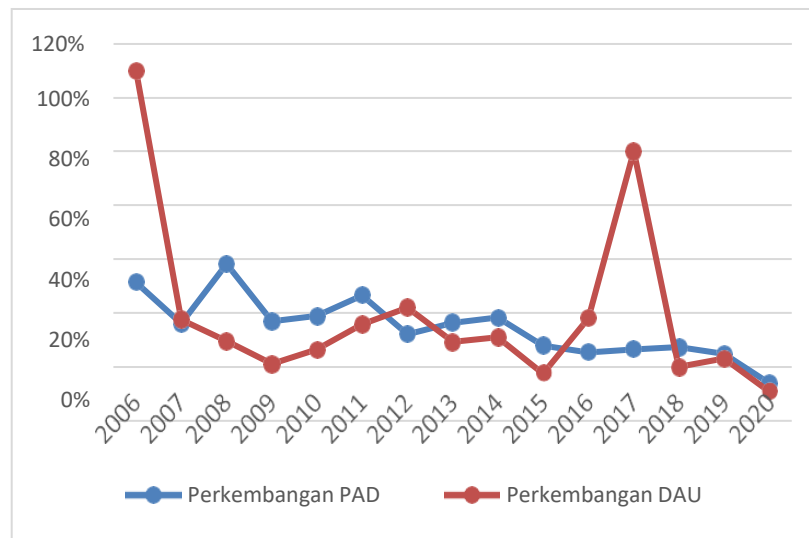
Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah akan tetapi pemerintah daerah memiliki sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran PAD terhadap Belanja Daerah, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Namun tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dikarenakan setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Dampak dari perbedaan ini adalah terjadinya ketimpangan sumber pendanaan antar daerah dimana daerah yang kaya akan potensi dan sumber daya memiliki sumber pendanaan yang lebih besar dibanding daerah yang miskin akan potensi daerahnya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam penelitian ini fokus pada Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Selain itu DAU juga

bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU di suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capa city*). Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU dibandingkan dengan DAK dan DBH.

Berdasarkan gambar 1.4 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami fluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Artinya penyaluran pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terlihat signifikan dengan nilai dari PAD dan DAU yang semakin meningkat tiap tahun. Peningkatan PAD dan DAU ini harusnya dibarengi dengan peningkatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, namun pada gambar 1.1 yang menggambarkan perkembangan realisasi Belanja Daerah yang cenderung menurun.

Gambar 1.4 Perkembangan Pendapatan Asli daerah dan DanaAlokasi Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020



Sumber: DPJK Kemenkeu, data diolah, 2022

Realisasi dan pengalokasian dana melalui APBD merefleksikan kinerja pengelolaan keuangan daerah. APBD juga berfungsi sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah yang sehat akan memberikan dampak positif terhadap kemudahan layanan masyarakat dan aksesibilitas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Putra, 2018). Seiring dengan regulasi tersebut, pemerintah daerah dituntut dapat mendayagunakan sumber daya dan potensi daerah untuk tujuan pembangunan daerah melalui pengelolaan APBD yang efektif dan produktif dengan mengurangi belanja konsumtif, meningkatkan PAD dan memperbesar alokasi belanja modal guna mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sumardjoko, 2017).

Provinsi Sulawesi Selatan tempat penelitian dilakukan merupakan salah satu gambaran provinsi yang mempunyai kemampuan keuangan daerah yang

masih cenderung rendah. Selain itu total belanja daerah yang memiliki tren menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, realisasi pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum di Provinsi Sulawesi Selatan justru berfluktuatif tetapi cenderung meningkat. Berdasarkan data dan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mengalami permasalahan yang berkaitan dengan belanja daerah yakni perkembangan pertumbuhan ekonomi, realisasi pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum yang seharusnya meningkatkan Belanja Daerah, dalam kenyataannya tidak. Berdasarkan uraian dan aspek di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2020?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanjadaerah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2020?
3. Seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanjadaerah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2020?
4. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2020.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanjadaerah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2020.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2020.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi dan hasanah ilmu tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dan hubungannya dengan belanja daerah di Sulawesi Selatan sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan Ilmu pengetahuan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan masukan dalam pengembangan keuangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah. Serta penelitian ini

diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika ingin melakukan penelitian yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah.

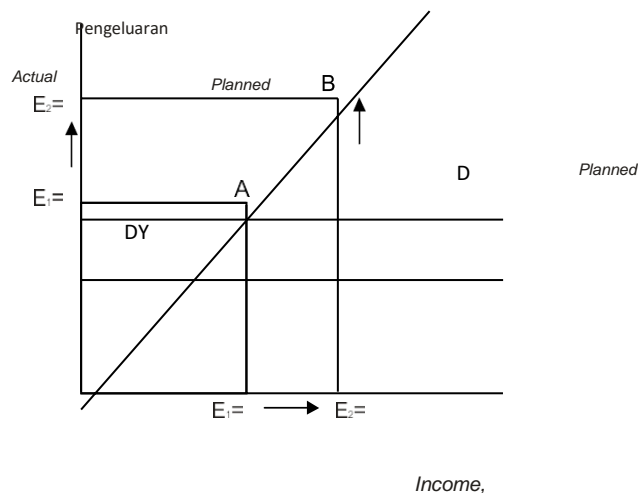
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam *Keynesian Cross* (Mankiw, 2003).



D

Gambar 2.1 Keynesian Cross

Pada grafik 1.1 di atas dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil

merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y). Bailey (1995) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara *particular* komponen-komponen pengeluaran pemerintah.

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesoebroto, 1993):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap- tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan dalam Mangkoesoebroto (1993), bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.

Teori Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut

sebagai *Wagner law of increased government activity*. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesoebroto, 1993). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut

Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

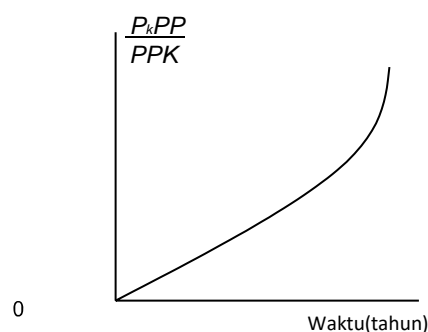
$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

PPP : Pengeluaran Pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...,n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam grafik 1.2 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993).



Gambar 2.2 Teori Pengeluaran Menurut Hukum Wagner

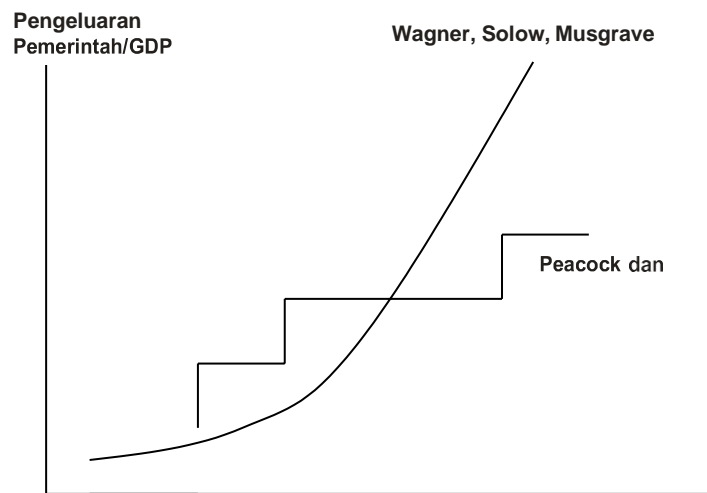
3. Teori Peacock & Wiseman.

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesoebroto, 1993). Teori mereka sering disebut sebagai *The Displacement Effect*, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut (Mangkoesoebroto, 1993).

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut (Mangkoesoebroto, 1993):

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”

Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga.



Gambar 2.3 Teori Pengeluaran Menurut Peacock dan Wiseman

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), desentralisasi fiskal mempunyai tiga pengertian, yaitu dekonsentrasi, artinya pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah; delegasi, artinya daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; dan devolusi, artinya berhubungan dengan situasi tertentu yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Menurut Rochjadi (2006) desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahankemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1, desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2005) agar tujuan desentralisasi fiskal tercapai, maka ada empat elemen utama dalam desentralisasi fiskal yang harus diperhatikan, yaitu sistem dana perimbangan (transfer), sistem pajak dan pinjaman daerah, system administrasi dan anggaran pemerintahan pusat dan daerah, dan penyediaan layanan publik dalam konteks penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sidik (2002) menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan desentralisasi sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem, nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam layanan sektor publik.

2.1.3 Belanja Daerah

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah berkaitan dengan Konsumsi Daerah. Pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah (government consumption) dan konsumsi rumah tangga (household consumption/private consumption) (UU No. 32 Tahun 2004).

Pembelian pemerintah atau belanja pemerintah adalah permintaan terhadap barang dan jasa. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua golongan yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Mankiw, 2007). Dalam teori pengeluaran pemerintah maka pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori tentang pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Teori Makro dan Teori Mikro (Prasetya, 2012).

a. Teori makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

b. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah yang akan disediakan melalui anggaran belanja.

Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014).

Berdasarkan PP Kepmendagri No. 13/2006 dan revisinya Kepmendagri No. 59 tahun 2007 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Urusan tersebut terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran (Kusumadewi dan Rahman, 2007).

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Jhingan (1994) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan pendapatan nyata per kapita lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata per kapita.

Menurut Todaro dan Smith (2006) pertumbuhan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi

masyarakat. Peningkatan produksi barang dan jasa berkaitan dengan efisiensi, alokasi biaya minimum dari keterbatasan sumber daya, dan pertumbuhan optimal dari sumber daya.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. (Mankiw, 2003).

Menurut Boediono (1985) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Sejalan dengan Boediono (1985), Sadono (1991) menyebutkan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Ada berbagai teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh berbagai ekonom, termasuk Mazhab Klasik, dalam teori Klasik. Adam Smith pertama kali mengajukan tesis ini dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of National Wealth and The Wealth of Nations*. Pertumbuhan ekonomi diatur oleh empat unsur, menurut Mazhab Klasik:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Jumlah stok barang-barang modal
- c. Luas tanas dan kekayaan alam
- d. Penggunaan teknologi

Orang-orang diberikan fleksibilitas yang paling mungkin dalam memilih kegiatan ekonomi apa yang mereka yakini paling baik untuk dilakukan, menurut keyakinan Smith. Menurut Smith, sistem ekonomipasar bebas akan menyediakan

sarana yang efektif untuk membawa perekonomian ke kesempatan kerja penuh dan memastikan pertumbuhan ekonomi sampai ekonomi mencapai titik stasioner. Pertumbuhan ekonomi akan dibantu oleh sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi sebagai akibat dari proses ini. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, Adam Smith menganggap pekerja sebagai salah satu input untuk proses produksi; pembagian kerja adalah topik utama perdebatan dalam teori ini. Aspek yang paling signifikan dalam pembangunan adalah ekspansi ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang di capai digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Metode tradisional untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah dengan menghitung kenaikan proporsi PDRB nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan kabupaten/kota. PDRB adalah nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi selama periode tertentu, atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah tertentu.

Teori pertumbuhan baru, Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen, menurut Romer (Lucky, 2011). Pertumbuhan ekonomi adalah produk dari sistem ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, menurut pandangan ini, ditentukan oleh sistem produksi, bukan oleh faktor-faktor di luarnya. Kemajuan teknologi bersifat endogen, dan pertumbuhan merupakan hasil keputusan pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Jika modal yang muncul bukan hanya modal fisik tetapi juga modal manusia, maka peran modal lebih besar dari sekedar sebagian pendapatan.

Menurut hipotesis pertumbuhan yang diuraikan di atas, faktor-faktor produksi yang dimiliki berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika parameter produksi ini membaik, pertumbuhan ekonomi diharapkan juga membaik. Tenaga kerja, akumulasi modal, dan teknologi merupakan komponen

produksi yang disebutkan dalam teori ketiga. Secara teori, pertumbuhan ekonomi biasanya sangat terkait dengan kegiatan investasi, dimana investasi memiliki dua arti: pertama, dapat memberikan pendapatan, yang dikenal sebagai dampak permintaan. Kedua, investasi dapat meningkatkan kapasitas output perekonomian dengan memperluas modal saham, yang biasa disebut sebagai dampak pengeluaran. (Lucky, 2011).

Dalam era desentralisasi fiskal, setiap pendapatan daerah dapat dijadikan modal oleh daerah untuk melakukan kegiatan pengeluaran sehingga nantinya dapat menciptakan yang baru, sesuai dengan teori pertumbuhan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, salah satunya adalah akumulasi modal. Ini dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pendapatan daerah dapat dijadikan sebagai modal di era desentralisasi. Sesuai dengan berbagai teori pertumbuhan yang telah dikemukakan sebelumnya, terlihat bahwa pendapatan daerah merupakan salah satu unsur produksi yang dimiliki oleh daerah untuk menciptakan output dan investasi, dan output dan investasi ini nantinya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan output dan investasi tersebut.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan perekonomian dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri (Bahrul, 2010). Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu

sumberpendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri (Darise, 2009).

Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggungsebagian beban belanjayang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari potensi masing-masing daerah yang berfungsi sebagai modal dasar Pemerintah Daerah dan mengurangi dependensi dana dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lainPendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

a. Pajak Daerah

Perpajakan daerah adalah tanggung jawab penduduk (masyarakat) untuk menyerahkan sebagian dari sumber dayanya kepada daerah dengan imbalan suatu jabatan tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi atau hukuman. Pajak daerah sebagai salah satu sumber daya asli daerah dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa, fasilitas, dan/atau izin tertentu yang diberikan untuk kepentingan masyarakat atau badan. Pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya pencetakan peta, pengujian kapal penangkap ikan, penggunaan aset daerah, pasar induk dan/atau toko, penjualan produksi daerah, izin pemanfaatan lahan, izin trayek, dan retribusi lainnya termasuk retribusi daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan Harta Kekayaan Terpisah merupakan hasil pengelolaan aset yang berbeda dengan pengelolaan APBD. Jika pengelola menghasilkan uang, keuntungan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Bagian Laba Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian Laba Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Badan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat merupakan salah satu hasil dari Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah adalah kelompok pendapatan yang tidak dapat digolongkan sebagai pajak daerah, retribusi daerah, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang bersifat terbuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik materiil dalam kegiatan tersebut. bekerja untuk mendukung, memperluas, dan/atau

memperkuat kebijakan daerah di bidang tertentu, seperti pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan dan pendapatan pajak denda.

Pentingnya Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan daerah, sebagai berikut yaitu Daerah Otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab (Abdullah, dkk, 2015).

Setiap daerah berkewajiban mensukseskan pembangunan daerah dan harus mampu mengandalkan pendapatan daerahnya terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan PAD, setiap daerah harus menggali segala Sumber Dana yang ada, yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah inilah yang akan membantu dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan potensial

yang dimiliki suatu daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan keuangannya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, setiap daerah harus menggali segala Sumber Dana yang ada, yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah inilah yang akan membantu dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan daerah (Abdullah, dkk, 2015).

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut beserta kontribusi dari masyarakat daerah setempat yaitu berasal pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan lain-lain yang sah dan bukan daripajak atau retribusi (Abdullah, dkk, 2015). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2007).

2.1.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan guna mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan

kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Manek, 2016).

Beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk grant kepada pemerintah daerah, yaitu: a) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geo-graphical equity); b) Untuk meningkatkan akuntabilitas (promote accountability); c) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif; dan d) Untuk meningkatkan keberterimaan (acceptability) pajak daerah. Pengalokasian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Dimana daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang relative lebih rendah agar dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam era otonomi (Mardiasmo, 2012).

Sebagaimana tujuan dan fungsi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai pemerataan keuangan daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah, mengingat DAU sendiri yang merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Yang pertama yaitu Kebutuhan Daerah dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah, seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan Produk domestik regional bruto (PDRB) (Mardiasmo, 2012).

2.2 Pengaruh Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita . Secara

tradisional Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB. Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah. Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi maka pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi Pertumbuhan Ekonomi.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah. Biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi Belanja Daerahnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran. Hal ini membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2007). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah

daripotensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri di antaranya yaitu Pajak serta Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisah, Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki suatu daerah dapat dijadikan sebagai tolok ukur atas kemandirian suatu daerah.

Daerah yang berpotensi besar dari sumber daya alamnya serta ditunjang dengan sarana maupun prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD suatu daerah meningkat, maka Dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi-potensi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanjadaerah pun akan ikut meningkat (Devita, dkk, 2014).

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah (Rahmawati dan Suryono, 2015). Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah yang memiliki peningkatan dalam jumlah Pendapatan Asli Daerah, maka terjadi peningkatan pula pada jumlahbelanja yang dikeluarkan. Pendapatan asli daerah (terutama pajak) akan memberi pengaruh terhadap pengeluaran anggaran belanja pemerintah daerah, atau yang lebih dikenal dengan nama tax spend hypothesis (Maimunah dan Akbar, 2008). Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tinggi akan memiliki pengeluaran untuk alokasi belanja daerah yang tinggi pula (Jolianis, 2014). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh daerah tersebut, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah pusat (Nurdini, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan dengan

pemerintah pusat rendah.

Penelitian lain membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Daerah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah terutama untuk pembangunan. Oleh karena itu semakin tinggi sumber Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin besar anggaran belanja yang dikeluarkan (Liando dan Hermanto, 2017)

2.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum, DAU merupakan Dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan meratakan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU menjadi jaminankesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dibeberapa daerah peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah dana alokasi umum dari pada pendapatan asli daerah. Dana transfer ini akan menambah alokasi Belanja Daerah yang berguna untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. Terlebih lagi adanya tujuan untuk pemerataan dengan memperhatikan kondisi sekitar sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Sehingga dengan ini, Pemerintah Daerah akan memacu untuk terus mengembangkan daerahnya dengan menggunakan Belanja Daerah yang telah ditetapkan (Sidik, et.al., 2002).

Pengalokasian Dana Alokasi Umum di daerah tertentu didasarkan pada

besar/kecil suatu celah fiskal (fiscal gap) yang terdapat disuatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Daerah dengan potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskal kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar, akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Semakin besar kebutuhan fiskal suatu daerah, maka belanja daerah di daerah tersebut akan semakin besar pula (Nurdini, dkk, 2014). Apabila terjadi peningkatan terhadap jumlah alokasi DAU, maka belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah juga ikut meningkat (Jolianis, 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiwin anggriani salawali, Paulus Kindangen and Agnes L.ch. P. Lopian, menemukan bahwa DanaAlokasi Umum di sepuluh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah memiliki pengaruh signifikan dan lebih dominan dalam membiayai belanja daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Maimunah (2006), Kurnia (2013), Lambut dkk (2013), dan Purbarini (2015). Sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah dalam melakukan belanja.

2.2.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita.

Secara tradisional Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB. Pertumbuhan Ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi. Biasanya jika Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi

dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran.

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah (Mardiasmo, 2004). Pendapatan asli daerah akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran (Syukriy dan Halim: 2003).

Menurut Widjaja (2004) transfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah

melalui APBD. Riyanto (2005), menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah pada era desentralisasi ini lebih disebabkan oleh aliran dana perimbangan khususnya pada Dana Alokasi Umum. Legrenzi dan Milas (2001) menyatakan bahwa dalam jangka panjang Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara pesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima (Syukriy dan Halim, 2003). Maka dari itu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, dan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Daerah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Rihfenti Ernayanti (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Timur. Penelitian tersebut menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan jumlah data yang diolah sebanyak 58. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil juga mempengaruhi belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada belanja daerah. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa R-square adalah 0,892 atau 89,2% berarti bahwa belanja daerah dapat dipengaruhi oleh variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, sedangkan sisanya 10,8% dipengaruhi oleh factor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Ida Bagus dan Dwirandra (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder periode tahun anggaran 2005-2012. Hasil penelitian menunjukan Dana Alokasi umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan pada Belanja Daerah.

Moh Rasyid (2018) meneliti terkait pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah terhadap belanja

daerah kabupaten/kota provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian tersebut melakukan regresi data panel dengan menggunakan eviews 9. Meneliti 11 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenga dengan menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara parsial terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah secara simultan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sri Maryati (2021) melakukan penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016- 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data dikumpulkan dan diolah menggunakan SPSS 22. Populasi dan sample dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota selama 5 tahun (2016-2020). Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Unit analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020.

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Dalam penelitian ini Darwanto dan Yustikasari menggunakan 3 variabel bebas dan 1 satu variabel terikat, variabel bebasnya adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

2.4 Kerangka Konseptual

Melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan salah satu cara untuk mengukur kemajuannya. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, yang menyiratkan bahwa jumlah produk dan jasa yang dihasilkan pada tahun berikutnya akan meningkat. Dengan kata lain produktivitas unsur-unsur produksi semakin meningkat, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

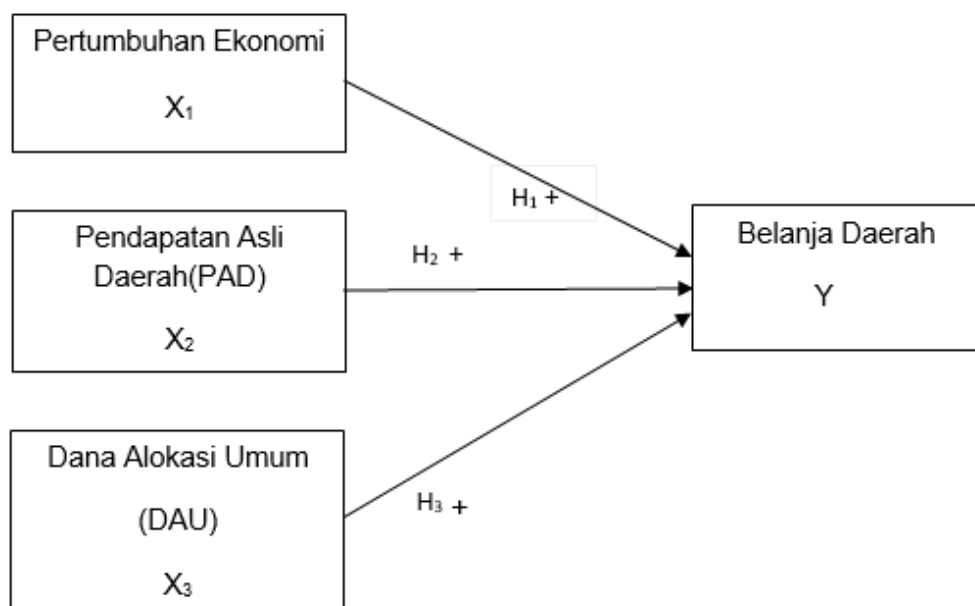
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diterima oleh suatu daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri untuk membiayai keperluan daerahnya dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada daerah tersebut. Dalam PAD, terdapat empat sumber penerimaan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut teori Peacock dan Wiseman bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan

pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Daerah dengan potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskal kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar, akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Semakin besar kebutuhan fiskal suatu daerah, maka belanja daerah di daerah tersebut akan semakin besar pula (Nurdini, dkk, 2014). Apabila terjadi peningkatan terhadap jumlah alokasi DAU, maka belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah juga ikut meningkat (Jolianis, 2014).

Legrenzi dan Milas (2001) menyatakan bahwa dalam jangka panjang Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima (Syukriy dan Halim, 2003). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_2 = Pendapatan Asli Daerah

X_3 = Dana Alokasi Umum

Y = Belanja Daerah

2.5 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan kerangka pikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020.
2. Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020.
3. Diduga dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020.
4. Diduga pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020.